CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Esa Ayu Aidafitri
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: esa.ayu0608@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Di tengah pembangunan yang tidak merata, Indonesia memerlukan kontribusi nyata dalam memandang ketidakmerataan tersebut. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara dapat menjadi satu sudut pandang yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai kemampuan untuk menyatukan seluruh wilayah dalam sektor pembangunan yang berkelanjutan dengan bingkai Wawasan Nusantara. Tujuan artikel ini ialah untuk melakukan analisis secara mendalam bagaimana peran Wawasan Nusantara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menelaah sumber-sumber akademik terkait konsep Wawasan Nusantara dan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menjadikan Wawasan Nusantara sebagai kacamata untuk melihat ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia mampu memperkuat integrasi nasional, meminimalisir kesenjangan antara wilayah, serta menumbuhkan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama dalam melangsungkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan menjadikan Wawasan Nusantara sebagai landasan berpikir yang strategis, pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih adil, merata, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan nasional secara menyeluruh di Indonesia.

Kata Kunci: Wawasan Nusantara, Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic nation that has significant challenges in maintaining unity and integrity. Amidst uneven development, Indonesia requires tangible contributions in viewing this disparity. Therefore, Wawasan Nusantara (Archipelagic Outlook) can become a perspective used by the Indonesian people, serving as a capability to unite all regions in the sustainable development sector within the framework of Wawasan Nusantara. The purpose of this article is to conduct an in-depth analysis of the role of Wawasan Nusantara in implementing sustainable development in Indonesia. The method used in this study is a literature review, examining academic sources related to the concept of Wawasan Nusantara and sustainable national development policies. The discussion results show that using Wawasan Nusantara as a lens to view the development inequalities occurring in Indonesia can strengthen national integration, minimize inter-regional disparities, and foster a sense of unity and shared responsibility in carrying out sustainable national development. By making Wawasan Nusantara a strategic foundation for thinking, development in Indonesia can proceed more justly, equitably, and be oriented towards the comprehensive sustainability of national development in Indonesia.

Keywords: Wawasan Nusantara, *Sustainable Development*, Indonesia.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 477
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sekaligus menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ketimpangan antara wilayah serta perbedaan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi menjadi isu utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara hadir dalam kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembangunan nasional (Naibaho et al., 2025). Wawasan Nusantara merupakan konsep cara pandang masyarakat terhadap negaranya sendiri dengan menegaskan prinsip persatuan dan kesatuan secara utuh. Wawasan Nusantara menempatkan kepentingan secara nasional diatas kepentingan otonomi daerah atau golongan, dengan mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan antarwilayah. Dalam konteks pembangunan asas-asas tersebut menjadi pedoman yang mengupayakan agar setiap kebijakan tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah dan memaksimalisasi solidaritas kebangsaan. Secara historis, konsep Wawasan Nusantara lahir dari kesadaran geografis bangsa Indonesia itu sendiri sebagai negara maritim, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan keterpaduan antara darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan ruang hidup bangsa.

Menurut Lilis Dewi Ratih dan Fatma Ulfatun Najicha tahun 2021, Wawasan Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai konsep geopolitik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat multikultural. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Akmal Rayhan (2024) yang menyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan fondasi historis dan sosiologis dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik. Dengan demikian, Wawasan Nusantara dapat menjadi instrumentasi penting dalam memperkuat identitas nasional sekaligus mengarahkan arah pembangunan agar tetap dijalankan menurut kepentingan bersama, tidak hanya sektoral atau regional semata. Keterkaitan antara Wawasan Nusantara dan pembangunan berkelanjutan terletak pada prinsip integrasi dan keseimbangan. Prinsip ini selaras dengan Wawasan Nusantara yang menuntut keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam setiap kebijakan yang diputuskan. Dengan demikian, penerapan Wawasan Nusantara dapat menjadi alas ideologis yang memastikan pembangunan berkelanjutan berjalan sesuai dengan karak keperluan bangsa Indonesia.

Sementara itu, arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia lebih berfokus pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Erna Emawati Chotim (2020) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki prioritas untuk menempatkan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai titik pusat tanpa melupakan aspek kelestarian sumber daya alam. Dalam kerangka ini penerapan nilai-nilai Wawasan Nusantara menjadi sangat relavan karena keduanya sama-sama krusial yang menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemerataan. Dengan mengintegrasikan Wawasan Nusantara ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia yang memiliki kemajuan secara nasional, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menjaga keutuhan lingkungan sosial dan kelestarian negara. Penerapan Wawasan Nusantara dalam kebijakan pembangunan nasional dapat ditemukan melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti pemerataan infrastruktur, pembangunan daerah tertinggal, dan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur. Nilai-nilai Wawasan Nusantara telah diinternalisasikan dalam kebijakan pembangunan nasional melalui prinsip pemerataan dan kesatuan wilayah. Hal ini tercermin dalam program Nawacita 2019-2024 dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 yang menempatkan pembangunan manusia dan wilayah terpadu sebagai prioritas. Wawasan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nusantara berupaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan secar berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi Wawasan Nusantara ke dalam sudut pandang masyarakat Indonesia menghadapi tantangan yang serius, seperti lemahnya koordinasi antara wilayah, kesenjangan yang tinggi, dan ketidaksadaran masyarakat terhadap nilai kebangsaan. Oleh karena itu, menjadikan Wawasan Nusantara sebagai sudut pandang masyarakat Indonesia menjadi langkah yang strategis untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berjangka panjang sesuai dengan asas keberlanjutan. Meskipun konsep Wawasan Nusantara memiliki nilai strategis, implementasinya dalam pembangunan berkelanjutan di Indoneia menemui berbagai tantangan. Salah satunya ketimpangan pembangunan antarwilayah dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan pembangunan sekarang lebih berorientasi pada ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam berbagai literatur yang sudah dikaji menyebutkan bahwa Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam jurnal milik Rayhan dkk. (2024) menjelaskan bahwa konsep Wawasan Nusantara memiliki dimensi historis, sosiologis, dan politis yang berperan sangat penting dalam mempersatukan sifat multikulturisme dari bangsa Indonesia. Secara historis, wawasan ini terlahir dari kesadaran geografis itu sendiri, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan berbagai suku, budaya, agama, serta kebudayaan yang lain sehingga diperlukan paradigma atau suatu sudut pandang geopolitik yang menyatukan seluruh partisipan bangsa. Kemudian, pandangan ini diperkuat juga oleh penelitian Ratih dan Najicha (2023) yang menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam pendidikan dan kebijakan publik dapat membentuk rasa nasionalisme dan tanggung jawab secara kolektif yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, Wawasan Nusantara menjadi fondasi yang mengarahkan kebijakan pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi memperhatikan keseimbangan antar daerah dan keberlanjutan lingkungan yang ada disekitar masyarakat. Chotim (2023) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus meliputi tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial, yang semuanya secara gamblang menuntut keterpaduan dan keadilan dalam implementasinya. Konsep ini sejalan dengan prinsip Wawasan Nusantara yang menempatkan keseimbangan dan keserasian sebagai nilai strategis yang mengelola sumber daya nasional secara seimbang. Pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai tersebut berisiko memperdalam ketimpangan antarwilayah serta menimbulkan krisis sosial, ekonomi dan ekologis di masa depan.

Lebih lanjut, Irawan, Marita, dan Nurcahyaningtyas (2024) mengemukakan bahwa penerapan strategi ekonomi sirkular dalam pembangunan berkelanjutan dapat menjadi bentuk konkret pelaksanaan nilai-nilai Wawasan Nusantara. Pendekatan ini tidak hanya menekankan efisiensi sumber daya, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang pada akhirnya memperkokoh kesatuan sosial-ekologis bangsa. Senada dengan itu, Sasmita, Restiatun, dan Yani (2025) menemukan bahwa kesenjangan pembangunan antarprovinsi di Indonesia masih cukup tinggi, yang menandakan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan dan terintegrasi secara nasional. Dalam hal ini, nilai keutuhan antarwilayah dan pemerataan yang diusung Wawasan Nusantara dapat

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dijadikan pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti tantangan penerapan Wawasan Nusantara di era globalisasi. Prabowo, Hustika, dan Nuryah (2024) menegaskan bahwa globalisasi membawa dua dampak bagi pembangunan di Indonesia yang kemudian, di satu sisi membuka peluang kemajuan ekonomi, namun di sisi lain dapat mengikis identitas dan solidaritas kebangsaan. Oleh sebab itu, penerapan Wawasan Nusantara perlu disertai penguatan hukum nasional, pendidikan karakter, dan literasi kebangsaan agar nilai-nilai nasionalisme tetap terjaga. Sabela dan Najicha (2024) turut menambahkan bahwa Wawasan Nusantara dapat berfungsi sebagai pelindung ideologis terhadap pengaruh-pengaruh asing, sekaligus sebagai pedoman moral bagi arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan nasional.

PEMBAHASAN

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap ruang hidupnya memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan kajian pustaka sebelumnya, konsep ini tidak hanya menegaskan kesatuan wilayah, tetapi juga menempatkan multikulturisme sosial dan budaya sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan sendiri menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Hubungan kedua konsep ini menjadi relevan karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman sumber daya, etnisitas, budaya, dan ekosistem, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan perbedaan tersebut dalam satu tujuan nasional. Tanpa perspektif Wawasan Nusantara, pembangunan berkelanjutan di Indonesia berpotensi timpang, eksploitatif, dan tidak inklusif. Sehingga diperlukan Wawasan Nusantara sebagai peran jembatan pengamat dalam merealisasikan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Integrasi konsep Wawasan Nusantara terlihat dari upaya pembangunan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga pemerataan pembangunan antarwilayah. Prinsip kesatuan wilayah menuntut agar keluaran hasil pembangunan tidak terlalu terkonsentrasi di wilayah Jawa dan kota-kota besar lainnya.

10 Kantong Manufaktur di Indonesia
(2010-2020, %)

Kab/Kota	Rata-rata Kontribusi terhadap PDRB Per Tahun	Rata-rata PDRB Industri Pengolahan Per Tahun (Rp Miliar)
Kota Bontang	84,4	56.921
Kota Kediri	81,8	98.065
Kab. Kudus	81,3	83.422
Kab. Bekasi	78,0	244.374
Kab. Cilacap	65,8	94.604
Kab. Karawang	65,7	168.473
Kab. Purwakarta	58,2	49.292
Kota Cilegon	57,5	75.762
Kab. Pasuruan	56,6	105.462
Kota Batam	55,8	117.456

Sumber: BPS

(Sumber: https://datanesia.id/10-kantong-manufaktur-di-indonesia/, diakses 14 November 2025)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan data diatas dapat kita teliti bahwa terdapat ketimpangan distribusi industri manufaktur dimana 9 dari 10 daerah yang tertera pada data diatas menunjukkan bahwa distribusi terkonsentrasi tinggi ada pada Pulau Jawa. Sehingga perlu pendekatan berbasis Wawasan Nusantara guna menemukan solusi guna mengatasi ketimpangan yang menghambat usaha pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Melalui perspektif Wawasan Nusantara konsentrasi industri yang tidak seimbang dapat dianalisis sebagai tantangan dalam mewujudkan persatuan dan pemerataan wilayah pembangunan. Nilai-nilai Wawasan Nusantara mengarahkan agar pembangunan industri memperhatikan potensi masing-masing daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan manufaktur di Indonesia tidak hanya menjadi tuas utama perekonomian, tetapi juga menjadi instrumen integrasi nasional yang menegaskan pembangunan yang adil, merata, dan mencerminkan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain aspek pemerataan, Wawasan Nusantara juga menekankan tentang pentingnya kesadaran identitas kebangsaan dan rasa memiliki terhadap tanah air. Dalam pembangunan berkelanjutan, kesadaran ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Rayhan dkk. (2024) menekankan bahwa dimensi histroris dan sosial Wawasan Nusantara memperkuat sikap cinta tanah air dan tanggung jawab secara kolektif. Wawasan Nusantara juga mengenali isu-isu lingkungan yang ada di negara Indonesia. Kemudian, Wawasan Nusantara tidak hanya berdasarkan pada ketimpangan secara manufaktur yang mana merupakan salah satu bentuk ketimpangan ekonomi. Lebih luas dari itu, Wawasan Nusantara juga memiliki relevansi terkait isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan kendaraan pribadi, serta usaha reboisasi yang dilakukan oleh otonomi daerah masing-masing. Hal-hal sederhana tersebut juga turut mengambil peran besar Wawasan Nusantara dalam memahami karakter khas bangsa Indonesia.

Dari sisi budaya, Wawasan Nusantara memberikan pemahaman bahwa keberagaman etnik merupakan modal sosial, bukan sumber konflik. Ini mendukung dimensi sosial pembangunan berkelanjutan yang ditekankan oleh Mufidah & Ayuningtias (2023). Dalam kehidupan nyata implementasi nilai ini dapat kita lihat pada perilaku toleransi antarwarga, penggunaan bahasa daerah sebagai bentuk penghargaan budaya, serta kerjasama lintas dalam kegiatan sosial. Hal ini memperkuat kepaduan sosial yang diperlukan agar program pembangunan agar dapat berjalan secara efektif. Di sekolah atau kampus nilai ini tercermin dalam sikap menghargai teman dari daerah yang berbeda dan melakukan kerja kelompok secara inklusif.

Hal mengenai Wawasan Nusantara dalam konteks pembangunan berkelanjutan semakin relevan ketika melihat bagaimana ketimpangan wilayah, kemampuan lokal, dan praktik ekonomi sirkular yang saling bergantung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Temuan Suparman & Muzakir (2023) yang menyoroti ketimpangan ekonomi antardaerah menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih menghadapi tantangan serius dalam menghadirkan keadilan distribusi manfaat ekonomi bagi seluruh warga negara. Dalam perspektif Wawasan Nusantara, ketimpangan seperti ini dapat melemahkan persatuan nasional karena masyarakat di wilayah tertinggal akan merasa tidak memperoleh porsi pembangunan yang adil. Di sini, praktik ekonomi sirkular seperti yang diuraikan Bahtiar & Kamelia (2023) menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya lokal melalui pemanfaatan manufaktur yang terdapat di masing-masing daerah. Yang kemudian, menjadi strategi peningkatan kesejahteraan Masyarakat setempat tanpa harus bergantung penuh pada pusat. Bahkan, implementasi tingkat kota seperti yang dicontohkan dalam penelitian Widiyanto dkk. (2024) membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam isu lingkungan dan pengurangan limbah. Mahdi & Ali (2024) juga mempertegas bahwa keberhasilan system pengelolaan limbah sangat bergantung pada integrasi

antara pemerintah, masyarakat, dan sistem pendukung manufaktur lokal. Jika disatukan, semua temuan ini menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara bukan hanya sekadar konsep geopolitik, tetapi menjadi prinsip kerja yang membangun Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada potensi daerah.

Selanjutnya, Wawasan Nusantara juga memperkuat aspek keamanan dan ketahanan nasional yang menjadi fondasi stabilitas pembangunan. Pembangunan berkelanjutan menuntut untuk kondisi politik dan keamanan yang stabil sehingga masyarakat dapat memiliki tingkat produktivitas kerja yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda, pelaporan aktivitas mencurigakan, atau keterlibatan dalam forum warga. Stabilitas ini penting, agar pembangunan nasional secara berkelanjutan berjalan tanpa gangguan.

Akhirnya, penerapan Wawasan Nusantara dalam Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan menciptakan regulasi yang adil dan mengedepankan keberlanjutan, sementara masyarakat harus menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab. Implementasi nyatanya antara lain partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan, keterlibatan dalam musyawarah desa, hingga mendukung produk lokal sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa penting dalam melakukan pemerataan pembangunan, pemanfaatan keunggulan lokal, integrasi nasional dan penguatan identitas nasional perlu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh.

PENUTUP

Wawasan Nusantara memiliki peran penting sebagai paradigma kebangsaan yang mampu menyatukan keragaman wilayah, budaya, dan nilai sosial Indonesia dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan memperhatikan keseimbangan kelestarian lingkungan. Berdasarkan kajian pustaka dan analisis pembahasan, terlihat bahwa nilai-nilai Wawasan Nusantara memperkuat arah tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta terciptanya harmoni sosial melalui penghargaan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara bukan hanya konsep historis, tetapi juga pedoman strategis yang tetap relevan dalam menjawab tantangan pembangunan modern yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antariksa, B. (2017). Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional, 23*(3), 395–412.

Chotim, E. E. (2023). Pembangunan Berkelanjutan dengan Dimensi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA), 4*(1).

Faried, A. I., Sembiring, R., Wardhani, N. S., & Hasanah, U. (2023). Transition to a circular economy-inspired waste management system. *World Journal of Advanced Research and Reviews*.

Irawan, D., Marita, A. C., & Nurcahyaningtyas. (2024). Pendekatan Ekonomi Sirkular sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 13*(3), 117–130.

Muliarta, I. N. (2023). The concept of circular economy in the implementation of source-based waste management in Bali. *Indonesian Journal of Agriculture and Environmental Analytics*.

Nugraha, D. I., & Priyanto, S. (2016). Penguatan karakter kebangsaan melalui wawasan nusantara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Civic Education, 10*(1), 55–67.

Prabowo, T., Hustika, V., & Nuryah. (2024). Wawasan Nusantara sebagai Prinsip Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Legalitas, 3*(2).

Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2023). Wawasan Nusantara sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme Warga Negara. *Jurnal Global Citizen, 10*(2).

Rayhan, A., Fatihah, D. S., Fauzia, F., Salsabila, S., & Taun. (2024). Landasan Sejarah, Sosiologis dan Politis Konsep Wawasan Nusantara dalam Mempersatukan Keberagaman Bangsa Indonesia. *Kultura, 2*(5), 201–207.

Sabela, Y., & Najicha, F. U. (2024). Wawasan Nusantara Sebagai Tameng Pengaruh Asing dalam Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12*(2).

Sasmita, P. Y., Restiatun, & Yani, A. (2025). Determinan Indeks Pembangunan Berkelanjutan di 34 Provinsi Indonesia. *Sebatik, 25*(2).

Simanjuntak, R. A. (2018). Integrasi wawasan nusantara dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Public Policy, 4*(1), 22–34.

Subekti, R. (2023). A circular economy-based plastic waste management policy in Indonesia (Compared to China and EU). *Yustisia Jurnal Hukum, 12*(2), 168–184.

Sutarto, R. (2015). Wawasan Nusantara sebagai landasan pembangunan wilayah Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3*(1), 15–28.

Wahyudi, A. (2020). Wawasan kebangsaan dan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional, 8*(2), 145–160.

Yuniar, I., Syamsiyah, N., & Yunarti, Y. (2024). Islamic economic review of waste circular economy policy analysis at the Metro City Environmental Service. *Jurnal Iqtisaduna*.